

Rasio-Rasio Penting Bagi Alokasi Belanja Modal: Suatu Kajian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Rizal Yufi Ma'arif¹, Shinta Permata Sari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

b200180192@student.ums.ac.id¹, sps274@ums.ac.id²

Keywords:

degrees of fiscal autonomy ratio, growth ratio, general allocation fund ratio, special allocation fund ratio, capital expenditure allocation.

Abstract: *Capital expenditure allocation has an important role in regional development, although local governments have boundaries to optimize the use of capital expenditures. It is still necessary to measure performance in the form of financial ratio analysis in assessing regional financial performance. Capital expenditure in the government of Central Java Province is very important because it's used to build facilities and infrastructure for the benefit of the community. The study aims to analyze the effect of the degree of fiscal autonomy ratio, growth ratio, general allocation fund ratio, and special allocation fund ratio on capital expenditure allocation. The population in this study are all districts/cities in Central Java Province for the 2018-2020 fiscal year. The sampling technique uses purposive sampling. The data analyze using multiple linear regression analysis. The results show that the degree of fiscal autonomy ratio, growth ratio, and general allocation fund ratio have effect on capital expenditure allocation, meanwhile the special allocation fund ratio has no effect on capital expenditure allocation.*

Kata Kunci:

rasio derajat otonomi fiskal, rasio pertumbuhan, rasio dana alokasi umum, rasio dana alokasi khusus, alokasi belanja modal.

Abstrak: Alokasi belanja modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, meskipun pemerintah daerah selama ini belum mampu mengoptimalkan penggunaan belanja modalnya, sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan berupa analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan daerah. Belanja pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat penting karena digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio derajat otonomi fiskal, rasio pertumbuhan, rasio dana alokasi umum dan rasio dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal, rasio pertumbuhan, dan rasio dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Article History:

Received: 13-07-2022

Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



----- ◆ -----

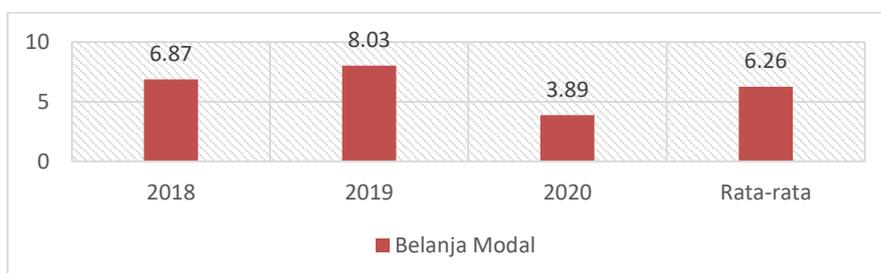
A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan (Pilut & Morasa, 2017). Hal tersebut merupakan salah satu sebab yang menjadi pendorong diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Secara umum, otonomi daerah dapat

diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Sutjipto *et al.*, 2019). Adapun tujuan otonomi daerah diharapkan bagi setiap daerah otonom mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan khususnya pada sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sangat penting (Abid *et al.*, 2018). Dalam mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal (Nurdiwaty *et al.*, 2017).

Peningkatan anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Widiasmara, 2019). Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Kanaiya & Mustanda, 2020). Pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran dalam bentuk anggaran belanja modal dari APBD untuk menambah aset tetap bagi daerah (Rizal & Erpita, 2019). Alokasi belanja modal diperuntukan untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Huda & Sumiati, 2019). Namun selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Kakasih *et al.*, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pengkajian ulang dalam penggunaan anggaran belanjanya agar terciptanya kualitas infrastruktur daerah yang memadai, sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memaksimalkan belanja modal agar pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal dan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat.

Berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah terutama mengenai pengalokasian anggaran belanja (Ikhyanuddin *et al.*, 2021). Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Oktavianti, 2020). Namun pemerintah daerah hanya memperuntukan penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin saja, sedangkan untuk belanja modal masih relatif sangat rendah. Berikut dibawah ini merupakan grafik alokasi belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020.



Gambar 1 Grafik Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih fluktuasi setiap tahunnya. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi belanja modal dari total belanja daerah selama periode 2018-2020 hanya sebesar 6,26%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih tergolong sangat rendah. Pemerintah pusat selalu

menghimbau kepada pemerintah daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30% dari total APBD (Suryani & Pariani, 2018). Namun pada kenyataannya pemerintah Provinsi Jawa tengah tidak mampu meningkatkan alokasi belanja modalnya sesuai target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa dikelola secara baik oleh pemerintah daerah. Terdapat satu cara dalam menilai kinerja pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah itu sendiri (Sartika, 2019).

Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus membutuhkan suatu pengukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Sari & Mustanda, 2019). Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berupa analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan antara satu akun dengan akun yang lainnya (Kusumawati *et al.*, 2018). Analisis rasio yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat berupa rasio derajat otonomi fiskal, rasio pertumbuhan, rasio dana alokasi umum dan rasio dana alokasi khusus.

Dengan adanya analisis rasio keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan menilai kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat memberikan solusi untuk pengambilan kebijakan dalam memperbaiki kinerja keuangan untuk periode selanjutnya. Dengan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah maka akan berdampak baik bagi pembangunan daerah.

1. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur sebuah keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi maka dibutuhkan suatu catatan dan pengukuran aktivitas organisasi dengan baik (Patarai, 2018). Setiap organisasi diperlukan sebuah pengendalian manajemen dalam mencapai tujuannya. Pengendalian manajemen tersebut berupa sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi (Susanto, 2019). Pengukuran kinerja kemudian dilakukan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu periode tertentu, sehingga berikutnya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan performa di masa depan. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan porsi yang semakin besar dari pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan bagi daerah tersebut (Zulkarnain, 2020).

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan dalam menilai kualitas kinerja keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah analisis rasio digunakan untuk menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dalam satu periode dengan periode sebelumnya. Selain itu dapat juga dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tertentu dengan daerah lainnya yang mempunyai potensi daerah sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah

daerah lainnya (Susanto, 2019). Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan adanya analisis rasio keuangan diharapkan dapat mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah agar kedepannya semakin lebih baik. Terdapat beberapa analisis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa rasio derajat otonomi fiskal, *growth ratio*, rasio dana alokasi umum dan rasio dana alokasi khusus.

3. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Rasio derajat otonomi fiskal digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu daerah sebagaimana tanggungjawab dari pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Dja'wa, 2021). Jika semakin baik kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah, maka akan berdampak baik terhadap alokasi belanja daerah terutama bagi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Agus & Safri (2016) dan Sutjipto *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal berpengaruh positif dan signifikansi terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan jika setiap kenaikan rasio derajat otonomi fiskal maka akan diikuti dengan kenaikan belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1: Rasio derajat otonomi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4. Growth Ratio

Growth ratio merupakan indikator rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dalam satu periode ke periode berikutnya (Andriyani *et al.*, 2020). Jika nilai pendapatan daerah semakin tinggi dengan diikuti semakin tingginya belanja modal, maka dapat dikatakan bahwa nilai pertumbuhannya bersifat positif. Berdasarkan penelitian Setiawan (2019) menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: *Growth ratio* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

5. Rasio Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Waskito *et al.*, 2019). Semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah, maka diharapkan akan berdampak kepada semakin besarnya alokasi belanja modal yang diterima oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Penelitian yang Sutjipto *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Rasio dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

6. Rasio Dana Alokasi Khusus

Rasio dana alokasi khusus merupakan indikator rasio yang digunakan untuk menghitung besarnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus pada daerah tersebut sesuai dengan prioritas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam APBN. Jika alokasi DAK yang diterima semakin besar, maka diharapkan dapat menambah besarnya alokasi pada belanja modal yang diterima oleh pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah. Penelitian Marlianita & Saleh (2020) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Rasio dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018-2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2018-2020 berupa data pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal dan belanja daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Variabel dependen pada penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal diukur dengan membandingkan antara belanja modal dengan total belanja daerah. Rumus yang digunakan pada alokasi belanja modal sama dengan penelitian Darmastuti *et al.*, (2022) yaitu:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio derajat otonomi fiskal, *growth ratio*, rasio dana alokasi umum dan rasio dana alokasi khusus.

1. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Rasio derajat otonomi fiskal (DOF) digunakan untuk membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, untuk melihat seberapa besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio derajat otonomi fiskal sesuai dengan penelitian Ulum (2018) adalah sebagai berikut:

$$\text{DOF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

2. Growth Ratio

Growth ratio ditujukan untuk menghitung kemampuan daerah dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan daerah yang sudah dicapai dalam periode tertentu dengan membandingkan antar pendapatan daerah tahun sekarang (P_t) dikurangi pendapatan daerah tahun sebelumnya (P_{t-1}) dengan pendapatan daerah sebelumnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung *growth ratio* sama dengan penelitian Ulum (2018) adalah sebagai berikut:

$$Growth Ratio = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

3. Rasio Dana Alokasi Umum

Rasio ini dihitung dengan dengan cara membandingkan antara besarnya dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh daerah dengan pendapatan daerah. Perhitungan pada rasio ini hampir sama dengan menghitung rasio ketergantungan. Menurut Susilawati *et al.*, (2018) rasio ketergantungan diperoleh dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Jadi rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah:

$$Rasio DAU = \frac{Dana Alokasi Umum}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

4. Rasio Dana Alokasi Khusus

Rasio dana alokasi khusus ditujukan untuk menghitung besarnya dana alokasi khusus (DAK) yang dibandingkan dengan pendapatan daerah. Perhitungan rasio ini hampir sama dengan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan transfer/dana perimbangan yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah (Nalle *et al.*, 2021). Jadi rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Rasio DAK = \frac{Dana Alokasi Khusus}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$ABM = a + b_1RDOF + b_2GR + b_3RDAU + b_4RDAK + e$$

Keterangan:

ABM	: Alokasi Belanja Modal
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien Regresi
RDOF	: Rasio Derajat Otonomi Fiskal
GR	: <i>Growth Ratio</i>
RDAU	: Rasio Dana Alokasi Umum
RDAK	: Rasio Dana Alokasi Khusus
e	: Error

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data penelitian berupa nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut hasil pengolahan data statistik deskriptif sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
RDOF	105	9,58	46,01	17,7460	6,52769
GR	105	-7,57	11,87	1,1838	4,63238
RDAU	105	26,90	50,64	43,8544	3,84180
RDAK	105	1,88	17,57	13,2575	2,48951
ABM	105	5,31	27,35	15,5834	4,82605

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata sebesar 17,75% dan standar deviasi sebesar 6,53%. *Growth ratio* memiliki nilai rata-rata sebesar 1,18% dan standar deviasi sebesar 4,63%. Nilai rata-rata rasio dana alokasi umum sebesar 43,85% dengan nilai standar deviasi sebesar 3,84%. Nilai rerata rasio dana alokasi khusus sebesar 13,26% dengan nilai standar deviasi sebesar 2,49%, sedangkan alokasi belanja modal sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar 15,58% dan standar deviasi sebesar 4,83%.

2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Hasil Uji Heteroskedastisitas	Uji Multikolinearitas	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Rasio Derajat Otonomi Fiskal	0,430	0,405	2,471
<i>Growth Ratio</i>	0,068	0,995	1,005
Rasio Dana Alokasi Umum	0,511	0,776	1,289
Rasio Dana Alokasi Khusus	0,906	0,443	2,256
<i>Kolmogrov-Smirnov</i>	0,107		
<i>Durbin-Watson</i>	1,370		

Sumber: data diolah, 2022

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai *asympt sig* sebesar 0,107 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 0,05 artinya data tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian autokorelasi dengan durbin waston diperoleh nilai D-W sebesar 1,370 maka dapat disimpulkan bahwatidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai D-W terletak diantara -2 dan +2.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Persamaan regresi dari hasil analisis regresi linear berganda adalah:

$$ABM = -8,993 + 0,370RDOF + 0,392GR + 0,284RDAU + 0,382RDAK + e$$

Tabel 3 di bawah ini maka menunjukkan hasil pengujian hipotesis yaitu:

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Model	Koefisien Regresi	Signifikansi	Keterangan
RDOF	0,370	0,000	H1 diterima**
GR	0,392	0,000	H2 diterima**
RDAU	0,284	0,021	H3 diterima*
RDAK	0,382	0,126	H4 ditolak
** Signifikan pada 0,01 dan 0,05			
* Signifikan pada 0,05			

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel rasio derajat otonomi fiskal dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agus & Safri (2016) dan Sutjipto *et al.*, (2019) bahwa rasio derajat otonomi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah memberikan dampak kenaikan pada alokasi belanja modal. Dengan semakin tinggi alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel *growth ratio* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *growth ratio* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2019) bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Jika nilai pendapatan daerah semakin tinggi dengan diikuti semakin tingginya belanja modal maka dapat dikatakan nilai pertumbuhannya bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi besar terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,021 ($0,021 < 0,05$) maka H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutjipto *et al.*, (2019) bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap semakin besarnya alokasi belanja modal yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,126 ($0,126 > 0,05$) maka H4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marlianita & Saleh (2020) bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya dana alokasi khusus tidak dapat memberikan kenaikan pada alokasi belanja modal. Dana alokasi khusus hanya diperuntukkan untuk belanja rutin lainnya sehingga belanja modal masih belum menjadi prioritas utama dalam belanja daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa rasio derajat otonomi fiskal, *growth ratio*, dan rasio dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio-rasio tersebut dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Untuk rasio dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio dana alokasi khusus belum memberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal secara optimal.

Dalam penelitian ini ternyata memberikan bukti empiris bahwa dana alokasi khusus belum mampu berkontribusi terhadap alokasi belanja modal. Hal ini diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah pusat mengalihkan dana alokasi khusus untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan tinjauan ulang tentang dana perimbangan, khususnya berupa dana alokasi khusus sebagai pembanding antara alokasi sebelum terjadi pandemi covid-19 dan pasca terjadi pandemi covid-19 untuk meningkatkan belanja modal masing-masing daerah.

REFERENSI

- Abid, M., Rahayu, S., dan Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 753–759.
- Agus, E., dan Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 2338–4603.
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, dan Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., dan Tannar, O. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Dja'wa, A. (2021). Analisis Kemampuan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 481–488.
- Huda, S., dan Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Ikhyanuddin, F., dan Safitri, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 117–128.
- Kakasih, R. A., Kawung, G. M. V., dan Tumangkeng, S. Y. L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 124–134.
- Kanaiya, I. P. C., dan Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109–1128. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i03.p15>
- Kusumawati, E., Trisnawati, R., dan Achyani, F. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Tinjauan Kasus dan Riset Empiris)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Marlianita, Y., dan Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 25–35.

- Nalle, F. W., Oki, K. K., dan Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 17(1), 184–197. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., dan Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Oktavianti, Y. A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah* (2nd ed.). Makasar: De La Macca.
- Pilat, J. J., dan Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45–56.
- Rizal, Y., dan Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Sari, N. M. D. P., dan Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759–4787. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
- Suryani, F., dan Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 11–22. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/det>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi*, 7(1), 81–92.
- Susilawati, D., Wardana, L. K., dan Rahmawati, I. F. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–99. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Sutjipto, H., Suci, S. C., dan Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia. *SUBSTANSI: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan*, 3(2), 104–117.
- Ulum, M. (2018). Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2016). *PROGRESS Conference*, 1(1), 451–459. <http://proceedings.stiawidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Waskito, Zuhrotun, dan Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 3(1), 61–74.